

Judul : Jalan Bareng Di Kalimantan Andika-Puan Lagi Pedekate
Tanggal : Jumat, 18 Februari 2022
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 1-8

Jalan Bareng Di Kalimantan Andika-Puan Lagi Pedekate

KETUA DPR Puan Maharani dan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa terbang bareng ke Kalimantan Timur untuk meninjau kawasan Ibu Kota Negara (IKN) baru. Keduanya tampak kompak dan akrab. Wah, sepertinya lagi pedekate nih.

Puan meninjau proyek IKN di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Rabu (16/2). Ia tampil santai dengan kemeja lengan panjang hitam, dan bawahan warna senada.

Sejumlah pejabat ikut menemani. Mereka adalah Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, dan Mendagri Tito

Karnavian.

Puan juga mengajak sejumlah pimpinan Alat Kelengkapan Dewan (AKD). Seperti Ketua Banggar DPR Said Abdullah, Ketua Komisi V DPR Lasarus, dan Wakil Ketua Komisi I DPR Utut Adianto.

Sebelum berkunjung ke titik nol, Puan dan rombongan lebih dulu meninjau Bendungan Sepaku Semoi di Penajam Paser Utara (PPU). Bendungan ini dibangun untuk pemenuhan air baku IKN Nusantara. Rombongan juga meninjau Jembatan Pulau Balang yang kini dalam tahap

penyelesaian akhir, yang akan menghubungkan Kota Balikpapan dengan Kecamatan Penajam, PPU.

Dari sana, rombongan geser ke lokasi Menara Pandang dan tempat Istana Negara akan dibangun. Setelah itu, Puan meninjau titik nol yang akan menjadi lokasi kantor-kantor lembaga tinggi negara, termasuk DPR.

Selama kunjungan itu, Puan dan Andika selalu berdekatan. Dalam beberapa momen, keduanya tampak "nempel". Sesekali, keduanya berdialog serius.

◆ BERSAMBUNG KE HAL 8

Jalan Bareng Di Kalimantan

... DARI HALAMAN 1

serius. Banyak juga momen mereka senyum bersama.

Puan mengatakan, kunjungan tersebut untuk mengawal pelaksanaan proyek IKN. Ia ingin memastikan seberapa siap pembangunan IKN setelah UU IKN disahkan DPR. Dengan melihat langsung lokasi calon IKN, ia berharap bisa memberikan catatan-catatan kepada Pemerintah.

"Saya berharap, proses pembangunan dapat berjalan lancar sesuai rencana," kata Puan, dalam keterangan tertulis, kemarin.

Putri bungsu Megawati Soekarnoputri ini meminta Pemerintah memperhatikan kebutuhan seluruh bangsa dalam proyek IKN. Menurutnya, perlu sinergi dan koordinasi seluruh unsur, dari elemen eksekutif juga legislatif. Jangan diputuskan satu pihak saja.

"Sehingga rakyat dari awal juga sudah merasakan bahwa IKN Nusantara ini adalah milik kita bersama. Bukan hanya urusan membangun gedung Pemerintah," ujar Ketua DPP PDIP ini.

Meski kunjungan Puan dan Andika bersama ini terkait urusan IKN, tapi di pikiran orang politik, memunculkan wacana duet keduanya di Pilpres 2024. Keduanya memang sudah mulai masuk radar survei capres. Keduanya juga sudah memiliki barisan relawan. Untuk Puan, ada Relawan Puan Maharani (RPM) dan Generasi Muda Penajam Nusantara atau Gema Puan. Sedangkan untuk Andika, ada Barisan Rakyat Andika Presiden Indonesia (BARAPI).

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menyatakan, kunjungan bersama Puan dan Andika itu bisa disebut ajang pedekate. Dedi melihat, Andika-Puan punya peluang untuk maju di 2024. Syaratnya, ada partai politik besar yang menyokong keduanya.

Dedi menerangkan, Andika dan Puan saat ini punya jabatan strategis. Puan sebagai Ketua DPR, Andika jadi Panglima TNI. Posisi itu bisa menjadi potensi besar sebagai panggung menuju pilpres.

Persoalannya, kata dia, Andika belum memiliki dukungan suara signifikan, baik personal maupun parpol. Memang, Andika punya modal kapasitas dengan latar belakang kepemimpinan di militer. Namun, politik elektoral tidak cukup hanya modal kapasitas. "Tetap jauh lebih penting soal peluang dipilih, baik oleh koalisi pengusung maupun publik," kata Dedi, kemarin.

Sementara, Puan juga belum menunjukkan kenaikan elektabilitas. Puan masih mengandalkan suara partai. Belum mendapat basis pendukung personal yang kuat. "Peluang Andika-Puan tetap ada meski banyak hambatan mewujudkannya," ujarnya.

Bagaimana tanggapan PDIP? Politisi senior PDIP Hendrawan Supratikno enggan berkomentar panjang soal wacana menduetkan Andika Puan. Kata dia, urusan memilih capres adalah kewenangan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri.

"Jadi, kami tidak boleh menambah daftar imaji dan spekulasi tentang pilpres," kata Hendrawan, tadi malam. ■ **scg**